

**TESIS**

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PEJABAT/PANITIA PEMERIKSA HASIL  
PEKERJAAN (PjPHP/PPHP) DALAM PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI  
PADA PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH**

**(Studi Kasus Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri**

**Padang Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2019/PN. Pdg)**

**OLEH:**

**ADNAN FARHANSYAH**

**NO. BP : 1820112023**

**PEMBIMBING:**

**PROF. DR. ELWI DANIL, S.H., M.H.**

**DR. M. HASBI, S.H., M.H.**



**PROGRAM STUDI MAGISTER (S2) ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ANDALAS**

**PADANG**

**2022**

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PEJABAT/PANITIA PEMERIKSA HASIL PEKERJAAN (PjPHP/PPHP) DALAM PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI DALAM PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH**

**(Studi Kasus Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Padang Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2019/PN. Pdg)**

**(Adnan Farhansyah, 1820112023, Program Studi Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Andalas, v + 175 Halaman, 2022)**

**ABSTRAK**

Pembangunan merupakan salah satu upaya pemerintah untuk mencapai kesejahteraan rakyat sehingga untuk melaksanakan pembangunan yang efisien, efektif, dan mendukung persaingan usaha yang sehat maka dilakukan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dengan dasar Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 dan saat ini dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Meskipun Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah telah diatur melalui mekanisme yang jelas, namun masih terdapat celah hukum yang kerap kali dimanfaatkan secara melawan hukum untuk kepentingan tertentu sebagaimana dalam Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2019/PN. Pdg dimana Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dalam kegiatan pengadaan pembangunan lanjutan RSUD Tapan Kab. Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2015 dinyatakan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi. Dalam putusan tersebut terlihat adanya penyertaan yang dilakukan oleh Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) namun tidak dimintai pertanggungjawabannya. Untuk meneliti masalah tersebut maka dilakukan penelitian dengan jenis penelitian normatif berdasarkan studi kepustakaan (*library research*) melalui analisis secara kualitatif terhadap bahan hukum primer dan sekunder yang ada. Hasil penelitian menemukan bahwa Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) tidak melakukan pemeriksaan dengan benar sesuai dengan prosedur yang mana pemeriksaan hanya dilakukan oleh perwakilan tim serta pemeriksaan fisik hanya dilakukan secara visual karena Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) tidak memiliki keahlian di bidang konstruksi serta menerima hasil pekerjaan padahal belum lengkap seluruhnya. Motif dari perbuatan ini adalah keinginan Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) untuk segera menyelesaikan pekerjaan sebelum tahun anggaran berakhir sehingga berimplikasi pada modus operandi perbuatan berupa menerima hasil pekerjaan yang tidak sesuai spesifikasi dan belum selesai sepenuhnya. Atas perbuatannya Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) memenuhi unsur pertanggungjawaban pidana dimana bentuk kesalahan Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) adalah kesengajaan dengan kemungkinan serta dapat diterapkan Pasal 2 Ayat (1) atau Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Penelitian ini merekomendasikan agar peranan Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) dalam aturan mengenai Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah diadakan kembali karena dapat menciptakan *check and balance*, selain itu diharapkan agar Aparat Penegak Hukum dapat menggali fakta-fakta secara mendalam dan menyeluruh sehingga setiap pihak yang terlibat dapat dimintai pertanggungjawaban pidana yang berimplikasi pada peningkatan angka pemulihan kerugian keuangan negara.

Kata Kunci : *Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, PjPHP/PPHP, Tindak Pidana Korupsi*

**CRIMINAL RESPONSIBILITY OF WORK OFFICERS/ COMMITTEE FOR  
CHECKING THE RESULTS OF WORK (PjPHP/PPHP) IN CRIMINAL ACTION  
CASES OF CORRUPTION IN PROCUREMENT OF GOVERNMENT  
GOODS/SERVICES**

**(Case Study of the Corruption Court Decision at the Padang District Court Number  
15/Pid.Sus-TPK/2019/PN. Pdg)**

*(Adnan Farhansyah, 1820112023, Master of Law Study Program, Faculty of Law,  
Andalas University, v + 175 Pages, 2022)*

**ABSTRACT**

Development is one of the government's efforts to achieve people's welfare so that in order to carry out efficient, effective development, and support healthy business competition, the Government Procurement of Goods/Services is carried out on the basis of Presidential Regulation Number 54 of 2010 as amended several times recently by Presidential Regulation Number 4 of 2015 concerning Government Procurement of Goods/Services. Even though the government's procurement of goods/services has been regulated through a clear mechanism, there are still legal loopholes that are often used against the law for certain purposes as stated in Decision Number 15/Pid.Sus-TPK/2019/PN. Pdg where the Commitment Making Officer in the procurement activities for the continued development of RSUD Tapan Kab. Pesisir Selatan for Fiscal Year 2015 was found guilty of committing a Corruption Crime. In the decision, it can be seen that there was participation made by the Employment Recipient Officer but was not held accountable. To examine this problem, a normative research type is carried out based on library research through qualitative analysis of existing primary and secondary legal materials. The results of the study found that the Committee for Receiving the Results of the Work did not carry out the inspection properly in accordance with the procedure in which the inspection was only carried out by team representatives and the physical examination was only carried out visually because the Committee for the Receiving of the Results of the Work did not have expertise in the field of construction and received the results of the work even though it is not completely complete. The motive for this action is the desire of the Work Result Recipient Committee to immediately complete the work before the end of the fiscal year so that it has implications for the modus operandi of the act in the form of accepting work that is not according to specifications and has not been fully completed. For his actions, the Employment Recipients Committee fulfills the element of criminal responsibility where the form of the Employment Receiving Committee error is intentional with the possibility and can be applied to Article 2 Paragraph (1) or Article 3 of Law Number 31 of 1999 Jo. Law Number 20 of 2001 concerning the Eradication of Corruption Crimes. This study recommends that the role of the Committee for the Receiving of Work Results in the rules regarding the Procurement of Government Goods/Services be held again because it can create checks and balances, besides that it is hoped that Law Enforcement Officials can explore the facts in depth and thoroughly so that every party involved can be held criminally responsible which has implications for increasing the recovery rate of state financial losses.

*Keywords: Government Procurement of Goods/Services, PjPHP/PPHP, Corruption Crime*